

## **BAB II**

### **GERAKAN PEMBERONTAKAN BERSENJATA DAN KONFLIK DI REPUBLIK DEMOKRASI KONGO**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang gerakan pemberontakan yang ada di Republik Demokrasi Kongo. Dimulai dari latar belakang terbentuk, gerakan pemberontak apa saja yang ada di Republik Demokrasi Kongo, dan kasus konflik bersenjata yang terjadi di Kongo dalam kurun waktu 2010 – 2015.

#### **1. Sejarah Konflik**

- Profil Negara Republik Demokrasi Kongo

Negara Republik Demokrasi Kongo atau *Democratic Republic of Congo/DRC* sebelumnya bernama Zaire, adalah sebuah negara yang berada di Afrika Tengah. Luas wilayahnya yaitu 2.344.858 km persegi dan ber ibukota di Kinsasha. Di bagian Utara Kongo berbatasan dengan Sudan, di bagian timur adalah Uganda, Burundi, Rwanda, dan Tanzania, di bagian barat berbatasan dengan Samudera Atlantik, kemudian di bagian selatan adalah Zambia dan Angola.

(Gambar 2.1 Peta Negara Republik Demokrasi Kongo)<sup>1</sup>



(Gambar 2.2 Profil data DRC menurut Divisi Statistik PBB)<sup>2</sup>

Democratic Republic of the Congo	
Source: World Statistics Pocketbook   United Nations Statistics Division	
Summary statistics	Economic indicators
Social indicators	Environment
<b>Summary statistics</b>	
Region	Middle Africa
Surface area (sq km)	2344858
Population (est., 000)	69360
Pop. density (per sq km)	29.6
Capital city	Kinshasa
Capital city pop. (000)	11116
Currency	Congo Franc (CDF)
UN membership date	20 September 1960

<sup>1</sup> [www.Worldatlas.com/country/africa/cg.htm](http://www.Worldatlas.com/country/africa/cg.htm) diakses pada 2 Juli 2016

<sup>2</sup> <http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=democratic%20republic%20of%20the%20congo> diakses pada 2 Juli 2016

Total penduduk dan populasi dari Republik Demokrasi Kongo adalah 74.877 jiwa menurut survey terakhir pada 2014. Sementara kepadatan penduduknya mencapai 29.6 jiwa per meter persegi, dan sebanyak 11.116 jiwa tinggal di ibukotanya yaitu Kinsasha.<sup>3</sup> Angka harapan hidup di Republik Demokrasi Kongo pada tahun 2015 sebesar 59 tahun.<sup>4</sup>

Republik Demokrasi Kongo memiliki hubungan yang naik turun dengan negara tetangganya yaitu Rwanda dan Uganda. Seringnya terjadi masalah perbatasan di bagian Timur Kongo menjadikan daerah ini tidak aman dan marak terjadi praktik pelanggaran ham. Seperti pembunuhan, perbudakan, perekrutan tentara anak, dan lainnya. Daerah Timur Kongo juga merupakan basis bagi banyak pasukan pemberontakan, dan FDLR, pasukan bersenjata yang berasal dari pengungsi Rwanda.

Republik Demokrasi Kongo merupakan wilayah yang kaya akan barang tambang, seperti minyak mentah, berlian, coltan, dan tembaga. Wilayah ini juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk perkebunan. Republik Demokrasi Kongo juga merupakan wilayah hutan hujan alami, bahkan merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia. Namun ironisnya Republik Demokrasi Kongo malah merupakan negara yang memiliki pendapatan nasional per-kapita

---

<sup>3</sup>

<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=democratic%20republic%20of%20the%20congo> diakses pada 2 Juli 2016

<sup>4</sup> <http://data.worldbank.org/country/congo-dem-rep> diakses pada 2 Juli 2016

rendah, hanya sebesar US\$ 484.2 pada tahun 2013. Menjadikan negara ini menjadi salah satu negara termiskin di dunia.<sup>5</sup>

- Fase Konflik di Republik Demokrasi Kongo

Julie Reynaerts, dalam bukunya yang berjudul MONUC/MONUSCO and Civilian Protection in Kivu membagi konflik di Republik Demokrasi Kongo menjadi beberapa fase sampai akhirnya terjun pasukan perdamaian MONUSCO untuk menggantikan MONUC :

*Pre-Transitional Phase (1999 - 2003)*

*Pre-Transitional Phase* atau fase pra – transisi merupakan fase yang dapat dikatakan merupakan awal mula lahirnya pemberontakan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, pemberontakan pertama yang lahir adalah pada tahun 1996 dimana Laurent Kabila kemudian berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Mobutu. Hasilnya adalah pemberontak Tutsi dan anti-Mobutu yang didukung oleh Rwanda, berhasil menduduki Kinsasha. Nama Zaire juga dirubah menjadi DR Congo, atau Republik Demokrasi Kongo.

Namun tidak lama setelahnya, gerakan pemberontakan baru lahir menentang pemerintahan Laurent Kabila. Kelompok yang menamakan dirinya sebagai RCD (Rally for Congolese Democracy) lahir dengan mendapat backing dari negara Rwanda. Lahir pula MLC (Congolese Liberation Movement) dengan

---

<sup>5</sup> <http://money.cnn.com/gallery/news/economy/2012/08/07/worlds-worst-economies/2.html>  
diakses pada 2 Juli 2016

dibantu oleh negara Uganda. Kedua gerakan pemberontakan ini berhasil menguasai wilayah Kongo Timur.<sup>6</sup>

Pada Juli 1999, enam pihak yang termasuk pihak PBB, MLC, RDC, Kepala Negara Republik Demokrasi Kongo, Kepala Negara Rwanda, dan Uganda bertemu untuk mendiskusikan kesepakatan damai di Lusaka untuk yang pertama kali. Setahun setelahnya PBB mengirim pasukan sebanyak 5.500 orang untuk mengontrol terjadinya proses genjatan senjata, namun tidak berjalan baik akibat perang antara pasukan Uganda dan Rwanda yang terus berperang. Pada 2001 Laurent Kabila ditembak mati, pemerintahan digantikan oleh anaknya Joseph Kabila.<sup>7</sup>

Pada pemerintahan Joseph Kabila, terjadi kemajuan pada tahun 2002 ketika pihak Uganda dan Rwanda setuju untuk menarik bantuan pasukan. Bahkan sempat terjadi pembicaraan damai yang bertempat di Afrika Selatan, pada saat itu kesepakatan damai dan penarikan pasukan sudah disetujui oleh pihak MLC namun ditolak oleh pihak RCD.<sup>8</sup> Hingga akhirnya pada Desember 2002, kesepakatan damai berhasil di tanda tangani oleh pihak pemerintah Republik Demokrasi Kongo dan RCD, dengan kesepakatan bahwa RCD mendapat jatah di

---

<sup>6</sup> <http://www.bbc.com/news/world-africa-13286306> diakses pada 2 Juli 2016

<sup>7</sup> Thomas Turner, *The Congo Wars : Conflict, Myth, and Reality*, 2007, hal 30

<sup>8</sup> Julie Reynaerts, *op. cit.*, hal 15

pemerintahan Republik Demokrasi Kongo.<sup>9</sup> Kemudian dibentuklah FARDC, sebagai gabungan pasukan militer Republik Demokrasi Kongo dengan RDC.<sup>10</sup>

#### *Transitional Phase (2003 - 2007)*

Pada tahun 2003 dimulai fase transisi, pada fase ini dapat dikatakan pemerintahan Republik Demokrasi Kongo sedang tidak stabil. Hal ini dikarenakan absennya pemerintahan, sehingga Joseph Kabila ditunjuk menjadi pemimpin pemerintahan sementara sampai hasil pemilu nantinya keluar.<sup>11</sup>

Pemerintahan sementara ini diatur dalam Konstitusi Transisional yang di sahkan pada April 2003. Dalam konstitusi itu tertulis bahwa Presiden Kabila diangkat menjadi Presiden Republik Demokrasi Kongo untuk memimpin hingga pemilu dua tahun mendatang. Sementara pemimpin dari mantan kelompok pemberontak RCD akan diangkat dan menjabat sebagai Wakil Presiden pada bulan Juli.<sup>12</sup>

Namun pada masa ini banyak sekali konflik dalam konflik yang terjadi, hal ini melemahkan pemerintah Republik Demokrasi Kongo yang sedang dalam proses transisi. Salah satunya adalah konflik yang terjadi di Ituri, yaitu pada 2003. Konflik di Ituri sebenarnya telah secara global disepakati dan disetujui untuk berdamai pada 2002, namun hingga penandatanganan perjanjian di Sun City

---

<sup>9</sup> <http://www.bbc.com/news/world-africa-13286306> diakses pada 2 Juli 2016

<sup>10</sup> Steven Spittaels and Philip Hilgert, *Mapping Conflict Motives : Eastern DRC, 2008, hal 12*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

tahun 2003 perang belum berakhir.<sup>13</sup> Ketika transisi pemerintahan yang disetujui sedang berlangsung, disaat yang sama terjadi perebutan wilayah oleh suku Hema dan Lendu. Pada 2003 ketika pasukan Uganda mundur dari Bunia, ibukota Provinsi Ituri, terjadi kekosongan militer yang membuat munculnya kerusuhan.<sup>14</sup>

Akibatnya, pasukan MONUC asal Uruguay diterjunkan ke Bunia untuk membantu mengamankan warga sipil. Hasilnya sebanyak 400 korban tewas karena aksi pembantaian antara suku yang bertikai. Meski begitu MONUC berhasil menyelamatkan 11.000 orang warga sipil yang berhasil kabur ke Lapangan Udara Bunia. Dikarenakan ketidak mampuan pasukan MONUC dalam mengamankan situasi di Bunia, maka diutus pasukan dari Uni Eropa (EU) yang dipimpin oleh Perancis dengan pengawasan dewan keamanan (Mandat Dewan Keamanan 1943), operasi ini disebut *Artemis*.<sup>15</sup> Operasi ini dilakukan untuk menanggulangi MONUC yang pada saat itu hanya memiliki wewenang mandat di Kivu Utara dan Selatan.

Konflik berikutnya terjadi di Bukavu pada awal 2004, ketika terjadi perselisihan dalam FARDC dan isu diskriminasi antara tentara Republik Demokrasi Kongo dengan tentara bekas pemberontak RCD. Terjadi pemberontakan di Bukavu, ibukota Provinsi Kivu Selatan, yang dimotori oleh Laurent Nkunda. Pada saat penyerangan tersebut, pasukan MONUC yang sedang berada di Bukavu hanya 800 orang. Pasukan MONUC dan FARDC tidak dapat menahan serangan pasukan pemberontak yang telah memasuki kota bahkan

---

<sup>13</sup> Julie Reynaerts, *loc. cit*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

sampai masuk ke area perlindungan. Akibatnya banyak warga sipil yang terpaksa harus mempertahankan dirinya sendiri.<sup>16</sup>

Krisis di Bukavu menelan korban sejumlah 88 jiwa dan lebih dari 25.000 orang warga sipil kehilangan tempat tinggal. Hal ini menjadi awal mulanya protes anti-MONUC dan hilangnya kepercayaan warga dengan tentara perdamaian. Namun setelah insiden ini Dewan Keamanan memberi mandat baru kepada MONUC serta menambah pasukan yang ada di negara Republik Demokrasi Kongo.<sup>17</sup>

Bagi rakyat Republik Demokrasi Kongo, tahun 2006 merupakan titik tumpu dari perubahan politik. Karena untuk pertama kalinya diadakan pemilihan umum sejak pertama kali merdeka dari Belgia yaitu 40 tahun lalu. Pemilihan ini dilakukan secara dua ronde, dengan dibantu oleh MONUC sebagai pasukan keamanannya. Sebanyak 18.300 personil MONUC diterjunkan demi memastikan kelancaran pemilu.<sup>18</sup> Ini merupakan keberhasilan besar bagi MONUC, pasalnya mereka berhasil menghentikan aksi CNDP, gerakan pemberontak yang di pimpin Laurent Nkunda, serta memastikan kelancaran pemilu.<sup>19</sup>

Pada pemilu yang dilaksanakan pada 30 Juli 2006 ini, mendapatkan hasil yaitu terpilihnya Presiden, dan jajaran parlemen di Republik Demokrasi Kongo. Pada pemilu tersebut Joseph Kabila muncul sebagai pemenang mengalahkan

---

<sup>16</sup> Julie Reynaerts, *op. Cit*, hal 16

<sup>17</sup> Rob Walker, Eyewitness: *Cheers and fears in Bukavu*, (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3790499.stm>) diakses pada 2 Juli 2016

<sup>18</sup> <http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/2006/congo.htm> diakses pada 2 Juli 2016

<sup>19</sup> Julie Reynaerts, *op cit.*, hal 16

rivalnya Jean Pierre-Bemba dari MLC, dengan perolehan 44,81% suara. Sekitar 7.590.485 suara, sementara Pierre-Bemba mendapatkan 3.392.592 suara.<sup>20</sup>

#### *Post Transitional Phase (2007 - 2010)*

Terpilihnya dan diangkatnya Joseph Kabila pada Februari 2007 melewati serangkaian proses pemilihan yang sah dan diakui secara global. Republik Demokrasi Kongo telah menjadi negara yang berdaulat. Itu artinya pemerintah Republik Demokrasi Kongo memiliki kewajiban utama untuk melindungi rakyat sipilnya.<sup>21</sup>

MONUC, kemudian memiliki pembaruan mandat pada maret dan secara efektif beralih fungsi. Sesuai dengan yang ditekankan oleh sekjen PBB, MONUC akan dibatasi aksinya sebagai pendukung (support) bagi Angkatan Bersenjata Pemerintah Republik Demokrasi Kongo, atau FARDC.<sup>22</sup> Fase ini adalah babak baru bagi MONUC yang seharusnya bisa berkonsentrasi dalam upaya konsolidasi, pembentukan instansi, dan mempromosikan rekonsiliasi nasional dan pemerintahan yang baik.<sup>23</sup>

Proses terpilihnya Joseph Kabila menuai banyak tuduhan pemalsuan dan kecurangan, sehingga banyak terjadi aksi protes. Salah satunya adalah yang dilancarkan oleh CNDP yang dimotori oleh Laurent Nkunda, atau jenderal

---

<sup>20</sup> UK Department of International Development report : Elections in Democratic Republic of Congo 2006, [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/67652/election\\_s-cd-2006.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67652/election_s-cd-2006.pdf) diakses pada 3 Juli 2016

<sup>21</sup> Julie Reynaerts, *op. Cit*, hal 17

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> <http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/yir/2006/congo.htm> diakses pada 3 Juli 2016

Nkunda. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat, gelombang demo, bahkan sampai akhirnya bergabung dengan CNDP. Sehingga akhirnya pecahlah kerusuhan antara FARDC dengan pemberontak CNDP yang berbasis di Goma, Kivu Utara.

Pada 2008, bulan Januari, dilaksanakan konferensi Goma yang bertujuan untuk mengakhiri permusuhan yang terjadi di Kivu, Utara dan Selatan. Perjanjian ini disetujui dan ditandatangani oleh dua puluh dua perwakilan anggota pemberontakan yang ada di Kivu Utara, termasuk CNDP. Perjanjian gencatan senjata ini di monitori oleh MONUC dalam pelaksanaannya. Namun perang tetap terjadi dan memuncak pada Oktober – November 2008 antara FARDC dan CNDP.<sup>24</sup> Laurent Nkunda mengancam akan memimpin CNDP untuk mengambil alih Kota Goma dan sekitarnya. Pasukan PBB yang berada disana kemudian menyiagakan warga sipil untuk berlindung di pinggir Kota Goma. Salah satu kota yang terkena dampak adalah Kiwanja, sebanyak 67 jiwa tewas dalam kejadian tersebut dikarenakan ketidaksiapan pasukan PBB untuk mengamankan tentara Mayi – Mayi yang ikut serta dalam kerusuhan.

Pada Januari 2009 pemimpin CNDP Laurent Nkunda akhirnya dapat ditangkap. Perjanjian damai juga disepakati antara pihak CNDP dan pemerintah Republik Demokrasi Kongo. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian 23 Maret 2009, isinya adalah mengatur integrasi dari pasukan CNDP kedalam

---

<sup>24</sup> Julie Reynaerts, *op Cit*, Hal 17

FARDC, mengubah CNDP menjadi partai politik, serta memberikan porsi kursi menteri kepada CNDP.<sup>25</sup>

Pada tahun 2010 Pemerintah Republik Demokrasi Kongo menekan PBB untuk segera menarik pasukan perdamaianya untuk mundur sebelum pemilu 2011. Pada Mei hingga Juli 2010 pasukan MONUC ditarik untuk mundur secara bertahap.<sup>26</sup> Kemudian diterjunkan MONUSCO pada 29 Juli 2010 atas keputusan dewan keamanan article 1925. Mandat utamanya yaitu adalah stabilisasi dan konsolidasi perdamaian, namun tetap mendahulukan keselamatan warga sipil.<sup>27</sup>

Pada tahun 2010 sampai 2011 terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia terutama di daerah Kivu Utara. Salah satunya adalah serangkaian kasus pemerkosaan massal yang terjadi di Kibua dan Mpofi selama 3 bulan yang dilakukan oleh pasukan FDLR dan desertir FARDC. Bentrok antara pasukan bersenjata Mayi – Mayi Cheka dengan FDLR. Perekrutan anak sebagai tentara di Goma dan Kiwanja.

Hingga pada 28 Februari 2011 berlangsung pemilu yang kedua, Joseph Kabila kembali terpilih menjadi Presiden Republik Demokrasi Kongo. Terjadi banyak penolakan dan protes dari masyarakat. Terjadi proses pemilihan yang kacau akibat situasi di Republik Demokrasi Kongo yang tidak kondusif dan banyaknya kerusakan yang tersebar di penjuru Republik Demokrasi Kongo. Ditambah lagi kondisi dari dalam badan Pasukan Bersenjata Republik Demokrasi

---

<sup>25</sup> Doddy Yasman, *Pemberontakan "Gerakan M23" di Republik Demokratik Kongo, 2013*, Hal 3

<sup>26</sup> <http://www.bbc.com/news/world-africa-13286306> diakses pada 3 Juli 2016

<sup>27</sup> Doddy Yasman, *loc. cit*

Kongo yang sedang tidak stabil karena isu diskriminasi, sehingga sulit untuk melakukan pemilu dengan lancar dan aman.

Pada April 2012 muncul gerakan pemberontakan baru yang menamakan dirinya M23. M23 adalah kepanjangan dari *March 23Movement*, atau Gerakan 23 Maret. Kelompok ini di pimpin oleh Jenderal Bosco Ntaganda dan Sultani Makena. Sementara pasukannya sendiri mayoritas adalah bekas pasukan CNDP dan suku tutsi yang tergabung dalam RCD. M23 beroperasi di wilayah timur Republik Demokrasi Kongo terutama Kivu Utara.<sup>28</sup>

## **2. Kelompok Bersenjata di Republik Demokrasi Kongo (2006 – 2015)**

Terdapat beberapa kelompok bersenjata yang berada di Republik Demokrasi Kongo. Kelompok bersenjata ini tidak seluruhnya menentang atau melawan Pemerintah Republik Demokrasi Kongo, namun ada juga yang saling bermusuhan dengan kelompok lain atau bahkan negara lain. Namun adanya kelompok bersenjata yang disebutkan di bawah, membuat situasi yang ada di Republik Demokrasi Kongo menjadi tidak kondusif dan penuh ketegangan. Kelompok – kelompok tersebut antara lain :

### **a. FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda)**

FDLR adalah organisasi bersenjata terbesar yang beroperasi di daerah Kivu Utara atau bagian timur Republik Demokrasi Kongo. Kelompok ini dibentuk oleh bekas tentara dan pelaku genosida pada tahun 1994 di Rwanda.<sup>29</sup> Meski pada

---

<sup>28</sup> Ismi Ruzan Azzahra, *op. Cit*, hal 29 - 30

<sup>29</sup> <http://www.raisehopeforcongo.org/content/armed-groups> diakses pada 3 Juli 2016

awalnya kelompok ini adalah bentukan dari pengungsi dari Rwanda, namun pada saat ini prajurit FDLR di rekrut dari pengungsi – pengungsi dari Kongo Timur. Sebanyak 1000 – 2000 orang baik petinggi maupun prajurit biasa FDLR beroperasi di daerah timur Republik Demokrasi Kongo.<sup>30</sup>

FDLR bertanggung jawab atas perekrutan tentara – tentara anak, pembunuhan massal, dan penyerangan terhadap warga sipil di daerah timur Kongo.<sup>31</sup>

FDLR sendiri menyatakan, bahwa mereka tidak mencari solusi secara militer untuk permasalahan di daerahnya. Permintaan terpentingnya adalah adanya dialog antar Rwanda. Apabila kondisi tersebut dapat terjadi maka mereka akan kembali ke Rwanda, namun apabila belum tercapai maka mereka membebaskan prajuritnya untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan kesatuan.<sup>32</sup>

FDLR adalah salah satu pihak yang membantu dan mensupport RCD pada tahun 2003. Bantuan dari FDLR berupa informasi, senjata, dan logistik.<sup>33</sup> Pada 2009 pemerintah Republik Demokrasi Kongo telah bekerjasama dengan pemerintah Rwanda untuk memperbolehkan pasukan Rwanda masuk untuk menghabisi pasukan FDLR. Namun upaya ini hanya sementara dan belum berhasil, terbukti dengan masih kuatnya posisi FDLR di Republik Demokrasi Kongo.<sup>34</sup>

b. “Mayi – Mayi”

---

<sup>30</sup> Steven Spittaels dan Philip Hilgert, *op. Cit*, hal 7-8

<sup>31</sup> Elsa Buchanan, *Battle for control of the DRC: Who are the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR)?*, 2015, <http://www.ibtimes.co.uk/> diakses pada 3 Juli 2016

<sup>32</sup> Interview oleh IPIS di Beni dengan MONUC official, pada December 2007

<sup>33</sup> Steven Spittaels dan Philip Hilgert, *op. Cit*, hal 9

<sup>34</sup> Elsa Buchanan, *Battle for control of the DRC: Who are the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR)?*, 2015, <http://www.ibtimes.co.uk/> diakses pada 3 Juli 2016

Mayi – Mayi adalah pasukan bersenjata tradisional di daerah. Istilah “Mayi – Mayi” adalah istilah yang digunakan untuk kelompok perlindungan-diri bersenjata yang berada di Kivu dan sekitarnya. Mayi – Mayi ini berjumlah banyak dan berbeda beda di setiap daerah atau sukunya. Untuk di daerah Kivu Utara, terdapat sebuah aliansi dari pasukan Mayi – Mayi yang ada di daerah itu. Aliansi dari Mayi - Mayi yang ada disana disebut PARECO, atau *Coalition of Patriotic Congolese Resistants*, kepemimpinan dari aliansi ini berada di tangan Colonel La Fontaine dari Suku Nande. Petinggi lainnya adalah Colonel Hugabo dari Suku Hutu, Colonel Ntasibanga dari suku Hunde, Colonel Blaise dari Suku Nyanga, dan Colonel Kirikicho dari Suku Tembo.<sup>35</sup>

PARECO berperang untuk tujuan melindungi hak suku yang tidak dianggap dan yang termarginalkan, suku yang ada di daerah tersebut. Karena dengan adanya FDLR dan CNDP yang mayoritas adalah dari Suku Tutsi yang sama-sama berjuang untuk menduduki daerah tersebut, suku – suku lainnya merasa terancam jika nantinya daerah mereka di klaim menjadi ‘Tanah-Tutsi’.<sup>36</sup> Selain itu, keamanan juga dibutuhkan warga Kivu Utara yang sering terkena dampak dari perang CNDP dengan FARDC.

Namun tidak hanya PARECO, nyatanya banyak sekali tersebar gerakan yang disebut Mayi – Mayi ini. Sebuah kelompok persatuan yang lebih kecil yang disebut ‘Grand Nord’ justru memiliki permasalahan yang pelik dengan penduduk lokal. Gerakan ini dipimpin oleh Baraka, seorang anak berusia 7 tahun, namun pada kenyataannya pengambilan keputusan dilakukan oleh perwakilan suku.

---

<sup>35</sup> Steven Spittaels dan philip Hilgert, *op cit.*, hal 14

<sup>36</sup> *Ibid*

Insiden yang diakibatkan kelompok ini adalah seringnya terjadi perkelahian atau suku.

Mayi – Mayi memang bukan merupakan ancaman besar bagi usaha konsolidasi damai yang dilakukan PBB. Bahkan lahirnya gerakan ini karena adanya kecemasan untuk melindungi diri sendiri dan menganggap pasukan negara dan pasukan perdamaian tidak berfungsi baik. Tidak ada catatan mengenai pelanggaran ham oleh Mayi – Mayi, namun kepentingan untuk melindungi hak asasi manusia dan nyawa menjadi hal yang sulit ketika kelompok bersenjata dari suku ini terus menerus berkonflik dengan tentara lain.

c. CNDP (National Congress for the Defence of the People)

National Congress for the Defence of the People atau CNDP adalah gerakan politik-militer yang awalnya diketuai oleh Jendral Nkunda. CNDP bermula sebagai gerakan yang mengklaim untuk melindungi hak dan kepentingan Suku Tutsi dan pengungsi Rwanda. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah banyak mendapat dukungan dari simpatisan Suku Hutu CNDP semakin berubah arah memperjuangkan kepentingan minoritas Tutsi di Kivu.<sup>37</sup>

CNDP memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya adalah :

- Mengakhiri keberadaan kelompok bersenjata asing, FDLR, di Republik Demokrasi Kongo.
- Pemulangan pengungsi Rwanda.
- Dibentuknya badan untuk menginvestigasi kejahatan militer dalam rentang 1998 – 2004.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 6

- Integrasi dengan pasukan FARDC, secara adil.
- Federalisasi DRC.<sup>38</sup>

Meskipun CNDP memiliki bagan, program, dan struktur yang sama dengan biro politik, namun CNDP adalah organisasi militer. Hampir semua anggotanya memiliki latar belakang militer. Ini dikarenakan asal mula anggotanya yang mayoritas adalah mantan pasukan RCD yang bergabung dengan FARDC. Banyak pula anggota bekas RDF, *Rwanda Defensive Force*, yang bergabung dalam gerakan ini, menimbulkan kecurigaan bahwa ada bantuan dari Rwanda untuk kelompok CNDP.

(Gambar 2.3 Area Operasi CNDP (Coklat berarsir)<sup>39</sup>



<sup>38</sup> International Crisis Group, *Congo: Bringing Peace to North-Kivu*, *Crisis Group Africa Report*, No 133, October 2007, hal 7

<sup>39</sup> Jason Stearns, *From CNDP to M23: The Evolution of an Armed Movement in Eastern Congo*, 2012

CNDP berbasis di Kivu Utara dan memiliki wilayah operasi yang cukup besar. Pendudukan kota yang terbesar adalah ketika menyerang Kota Goma dan Kiwanja pada tahun 2008.

Pada tahun 2009 pemimpin CNDP Jenderal Nkunda berhasil tertangkap. Pemimpin CNDP digantikan oleh Komandan Bosco Ntaganda, Ntaganda kemudian bersedia untuk menghentikan perlawanan bersenjata. Ntaganda menandatangani perjanjian damai yang berlangsung pada 23 Maret 2009. Lewat perjanjian itu disepakati bahwa pasukan CNDP akan melebur dengan pasukan Republik Demokrasi Kongo, FARDC. CNDP berubah fungsinya sebagai partai politik, bukan lagi sebagai gerakan bersenjata. Perwira dan pejabat CNDP akan diteruskan masa jabatan dan kerjanya. CNDP akan mendapat jatah kursi di parlemen Republik Demokrasi Kongo.<sup>40</sup>

d. M23

M23 merupakan gerakan yang lahir akibat ketidakpuasan atas implementasi dari perjanjian 23 Maret 2009. Kelompok ini lahir pada 4 April 2012 dengan anggota yang awal mulanya berjumlah 300 orang. Anggota – anggota ini mayoritas adalah mantan prajurit CNDP yang melakukan desersi dari FARDC, sementara elit militernya mayoritas adalah orang – orang dari Suku Tutsi.

Pemberontakan M23 tidak bisa dilepaskan dari pemberontakan yang terjadi terdahulu sebelumnya di DRC. Karena pada dasarnya pemberontakan M23

---

<sup>40</sup> Steven Spittaels dan Philip Hilgert, *op. Cit*, hal 6–7

merupakan lanjutan dan bagian dari pemberontakan terdahulu yang terjadi di DRC. Hal tersebut bisa dilihat dari para elit dan tokoh-tokoh yang ada di balik gerakan pemberontakan ini, mereka merupakan para elit dan tokoh-tokoh dari gerakan pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Pembuktian lain juga bisa dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok gerakan yang ada dan terlibat dalam pemberontakan tersebut sama dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok gerakan dari pemberontakan sebelumnya.<sup>41</sup>

Pemberontakan M23 terjadi karena pertentangan antara pihak pemberontak dengan pemerintah DRC mengenai mekanisme dan pelaksanaan perjanjian 23 maret 2009. Pertentangan ini juga meliputi pembagian kekuasaan antara pihak yang berseteru dalam konflik sebelumnya serta kelanjutan nasib mantan pemberontak yang berintegrasi dengan pemerintah dan nasib suku Tutsi yang ada di DRC secara keseluruhan. Pemerintah dinilai telah menyimpang dan tidak melaksanakan kesepakatan damai tersebut serta mengabaikan para pengungsi suku Tutsi yang merupakan suku minoritas yang menjadi alasan utama dari perjuangan pemberontakan sebelumnya.<sup>42</sup>

Kabila dinilai telah melanggar perjanjian damai tanggal 23 Maret 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

1. CNDP akan mengintegrasikan pasukannya kedalam angkatan bersenjata DRC (FADRC) dan kepolisian dan CNDP sendiri akan mengubah diri menjadi partai politik.

---

<sup>41</sup> Doddy Yasman, *op. Cit*, hal 1

<sup>42</sup> *Ibid*, Hal 3

2. Pejabat Administratif CNDP akan di angkat menjadi pejabat Administratif di DRC dan posisi menteri akan dibagi dengan anggota CNDP.

3. Pemerintah akan menghidupkan kembali pembicaraan dengan komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR) dan Negara yang bertetangga dengan DRC untuk memulangkan para pengungsi khususnya pengungsi Tutsi.

4. Pemerintah tidak akan memindah tugaskan petugas CNDP yang sudah berintegrasi dari wilayah North Kivu.<sup>43</sup>

Pada kenyataannya banyak terjadi diskriminasi dalam tubuh FARDC antara pasukan yang merupakan mantan CNDP dan bukan. Para mantan anggota CNDP mendapatkan gaji yang lebih sedikit dan perlakuan yang tidak sama dibandingkan dengan anggota pasukan FARDC lainnya yang bukan mantan anggota CNDP. Selain itu, mereka juga tidak diberikan jabatan dalam angkatan bersenjata DRC.<sup>44</sup> Selama jalannya pemerintahan setelah perjanjian ditandatangani bahkan setelah beberapa kali pergantian posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan presiden Joseph Kabila tidak satupun dari para mantan anggota CNDP yang menduduki jabatan posisi menteri. Para mantan anggota CNDP hanya di masukkan dalam pemerintahan wilayah dan disebar ke seluruh

---

<sup>43</sup> The Jakarta Post, *M23 rebels press forward after east Congo gains*, 2012.

<sup>44</sup> Pasca Rebut Goma, Pemberontak Kongo Siap "Bebaskan" Negara, [http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89148/pasca\\_rebut\\_goma\\_pemberontak\\_kongo\\_nyatakan\\_siap\\_bebaskan\\_negara](http://www.analisadaily.com/news/read/2012/11/22/89148/pasca_rebut_goma_pemberontak_kongo_nyatakan_siap_bebaskan_negara), diakses pada 4 Juli 2016

penjuru DRC. Dalam konteks ini pemerintah sudah melanggar dua poin dalam perjanjian ini yaitu poin ke-2 dan ke-4.<sup>45</sup>

Bagi pemerintahan di Kinsasha, perjanjian dan integrasi pasukan militer CNDP memang dianggap solusi sementara. Bahkan dalam wawancara yang dilakukan *Usalama Project* dengan salah satu petinggi militer di Goma, dijelaskan bahwa mereka akan secara perlahan mengintegrasikan pasukan CNDP ke dalam FARDC, sehingga rantai komandonya terputus, lalu mengirim petinggi mereka ke tempat yang berbeda-beda.<sup>46</sup>

(Gambar 2.4 Wilayah M23 (Merah berarsir)<sup>47</sup>



M23 beroperasi di Kivu Utara, bermula dari kota Masisi di utara Kota Goma, Ibukota Kivu Utara. Seiring waktu gerakan M23 ini berhasil merebut Kota

<sup>45</sup> Doddy Yasman, *op. cit*, hal 3

<sup>46</sup> Wawancara Usalama dalam, Jason Stearns, *from CNDP to M23 : The Evolution of Armed Movement in Eastern Congo, 2012*, hal 39

<sup>47</sup> Jason Stearns, *From CNDP to M23: The Evolution of an Armed Movement in Eastern Congo, 2012*

Goma dan wilayah sekitarnya, seperti Kiwanja, Bunagana, dan Rutshuru. Ini menyebabkan kurang lebih 700 ribu warga yang mengungsi dari tempat tinggalnya.<sup>48</sup>

e. ADF (Allied Democratic Forces)

ADF atau *Allied Democratic Forces*, merupakan gerakan pemberontak muslim Uganda yang beroperasi di wilayah Republik Demokrasi Kongo dan Uganda. Aktif kembali sejak kedatangannya tahun 2010 di Beni, sebuah daerah perbatasan antara Uganda dan Republik Demokrasi Kongo. Menurut laporan resmi dari PBB setidaknya 100.000 warga dipaksa mengungsi ketika pasukan FARDC melakukan operasi untuk melumpuhkan kelompok ini.<sup>49</sup>

ADF sebenarnya adalah grup yang terbilang kecil dan memiliki daerah operasi yang berbeda dengan kelompok pemberontak besar lainnya yang banyak berkisaran di Kota Goma. Namun kelompok ini terlibat dalam pembunuhan massal 100 orang di Mbu'a, sebuah desa di dekat Beni tahun 2014.<sup>50</sup> Secara jumlah atau kekuatan perang ADF sebetulnya bukan tandingan bagi FARDC, namun hal yang membuat kelompok ini berbahaya adalah kemampuan mereka untuk keluar dan masuk perbatasan dengan bergerilya, hal yang sudah dilakukan selama 20 tahun.

---

<sup>48</sup> Izmi Ruzan Azzahra, *op. cit*, hal 31

<sup>49</sup> <http://www.raisehopeforcongo.org/content/armed-groups> diakses pada 4 Juli 2016

<sup>50</sup> Ervan Hardoko, *Pembantaian di Republik Demokratik Kongo, 100 Tewas*, Kompas, 24 November 2014